

Upaya Peninjauan Kembali Pk Analisis Hukum Islam

[Books] Upaya Peninjauan Kembali Pk Analisis Hukum Islam

Getting the books Upaya Peninjauan Kembali Pk Analisis Hukum Islam now is not type of inspiring means. You could not isolated going with book collection or library or borrowing from your associates to admittance them. This is an very simple means to specifically get guide by on-line. This online pronouncement Upaya Peninjauan Kembali Pk Analisis Hukum Islam can be one of the options to accompany you subsequently having supplementary time.

It will not waste your time. recognize me, the e-book will totally look you supplementary concern to read. Just invest tiny become old to gain access to this on-line declaration **Upaya Peninjauan Kembali Pk Analisis Hukum Islam** as skillfully as review them wherever you are now.

Upaya Peninjauan Kembali Pk Analisis

ANALISIS YURIDIS TERHADAP UPAYA HUKUM LUAR BIASA ...

ANALISIS YURIDIS TERHADAP UPAYA HUKUM LUAR BIASA PENINJAUAN KEMBALI (PK) OLEH JAKSA DALAM SISTEM HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA Ahmad Fauzi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa ahmadfauzi@gmailcom Abstrak Peninjauan kembali oleh Jaksa dalam perkara pidana merupakan paradoks yang terjadi

ANALISIS PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI NOMOR ...

ANALISIS PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI NOMOR 21/PK/Ag/2013 TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN DENGAN ALASAN WALI NIKAH YANG TIDAK SAH SKRIPSI Disusun untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna

UPAYA PENINJAUAN KEMBALI (PK) (ANALISIS HUKUM ...

Yang menarik dalam proses peninjauan kembali kasus Munir adalah, bahwa peninjauan kembali merupakan upaya hukum luar biasa yang menjadi hak bagi terdakwa atau ahli warisnya, namun ketentuan ini diterobos oleh jaksa penuntut umum melalui berbagai argumentasi hukum yang akan penulis paparkan pada bab-bab selanjutnya

KAJIAN YURIDIS UPAYA PENINJAUAN KEMBALI LEBIH DARI ...

Kata Kunci: Peninjauan Kembali, Upaya Hukum PK, Asas Litis Finiri Oportet, Perkara Pidana Abstract Basically, a review is an extraordinary remedy provided to protect the interests of the convicted person, not the interests of the state or the victim in order to seek material truth Further developments, the Panel of Judges of the Constitutional

ANALISIS YURIDIS PERMOHONAN EKSEKUSI ATAS PUTUSAN ...

eksekusi atas Putusan Peninjauan Kembali (PK) berdasarkan kewenangan Jaksa Pengacara Negara Masalah yang dikaji apakah Jaksa Pengacara

Negara memiliki kewenangan dalam permohonan eksekusi atas Putusan Peninjauan Kembali Nomor 247/PK/PDT/2013, bagaimanapun hambatan-hambatannya dan upaya solusi dalam menghadapi hambatan-hambatan tersebut

ANALISIS TENTANG SYARAT FORMIL DAN MATERIL DALAM ...

Upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) adalah upaya hukum terakhir yang diberikan undang-undang setelah upaya hukum Banding, Kasasi yang telah ditempuh sudah tertutup sehingga terpidana dapat mengajukan upaya hukum PK PK sering sekali digunakan sebagai senjata untuk menghindarkan diri dari jeratan hukum oleh

ANALISIS YURIDIS NOVUM DALAM BENTUK ERROR IN ...

PENINJAUAN KEMBALI PERKARA PEMBUNUHAN DENGAN TERPIDANA IMAM CHAMBALI ALIAS KEMAT DAN UPAYA HUKUM TERPIDANA UNTUK MEMPEROLEH REHABILITASI DAN GANTI RUGI (STUDI KASUS DALAM PUTUSAN NOMOR 89 PK/PID/2008) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2011 in persona korban dapat dijadikan salah satu dasar pengajuan peninjauan kembali Serta upaya

PENINJAUAN KEMBALI DALAM SENGKETA PAJAK

maupun kasasi, akan tetapi upaya hukum Peninjauan Kembali ke MA Sehubungan dengan adanya upaya hukum Peninjauan Kembali ke MA, Penulis akan membahas mengenai : Bagaimana prosedur Peninjauan Kembali dalam sengketa pajak di Mahkamah Agung? Lingkungan peradilan mana di Mahkamah Agung yang mengadili Peninjauan Kembali

RATIO DECIDENDI HAKIM MA DALAM MENERIMA ...

Peninjauan kembali merupakan upaya hukum luar biasa yang dapat dilakukan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap Dibentuknya lembaga peninjauan kembali dalam perkara pidana berpijak pada asas peninjauan kembali yang dicantumkan dalam pasal 263 ayat (1) KUHP Pasal ini menyatakan bahwa terhadap putusan

PENINJAUAN KEMBALI DALAM PERKARA PIDANA YANG ...

Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana, yang menyatakan bahwa permohonan peninjauan kembali dalam perkara pidana dibatasi hanya satu kali Hal ini menimbulkan kebingungan bagi aparat penegak hukum dan masyarakat pencari keadilan Tulisan ini mengkaji solusi atas polemik peninjauan kembali dalam perkara pidana

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN ...

Peninjauan Kembali RTRW adalah upaya untuk melihat kesesuaian antara RTRW dan kebutuhan pembangunan yang memperhatikan perkembangan lingkungan strategis dan dinamika pembangunan, serta pelaksanaan pemanfaatan ruang - 4 - BIRO HUKUM DAN HUBUNGAN MASYARAKAT 7 Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia

JURNAL HUKUM UPAYA HUKUM KASASI DEMI ...

dilakukan melalui upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali tetapi upaya hukum KDKH tidak dapat melenyapkan dan menghapuskan upaya hukum peninjauan kembali (PK)⁵ Pada dasarnya upaya hukum ini bertujuan untuk 6 5 AK Basuni Masyarif, 2015, Kompilasi Petunjuk Teknis Terkait Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum (Buku I s/d

MAKNA "AHLI WARIS" SEBAGAI SUBJEK PENGAJUAN ...

Makna "Ahli Waris" sebagai Subjek Pengajuan Peninjauan Kembali (Ramiyanto) | 51 ABSTRAK Peninjauan Kembali (PK) merupakan salah satu dari upaya hukum luar biasa dalam hukum pidana Indonesia Ahli waris merupakan salah satu pihak yang berhak mengajukan PK dalam perkara pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP, yang rumusnya:

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id PENGAJUAN ...

PK/PID/2012) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Penelitian ini mengkaji dan menjawab permasalahan mengenai argumentasi hukum hakim mahkamah agung dalam memeriksa dan memutus permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh pemohon peninjauan kembali terhadap novum atau bukti baru sesuai dengan Pasal 263 KUHAP

Tinjauan Yuridis terhadap Upaya Hukum Peninjauan Kembali ...

Upaya hukum peninjauan kembali pertama kali diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam perkara pidana atas nama Terpidana Muchtar Pakpahan dan diterima dan dikabulkan oleh Mahkamah Agung dengan putusan Mahkamah Agung Nomor: 55 PK/Pid/1996 Dengan diterimanya upaya hukum peninjauan kembali dari Jaksa/Penuntut

KEWENANGAN JAKSA SEBAGAI PENGACARA NEGARA ...

studi kasus Putusan No247 /PK/ PDT/2015 Secara lebih terperinci penulis akan menganalisis secara yuridis bagaimana kewenangan Jaksa sebagai Pengacara Negara dalam permohonan eksekusi atas putusan Peninjauan Kembali dalam kasus Putusan No247/PK/PDT/2015 dan upaya yang dilakukan Jaksa Pengacara

SURAT EDARAN - Mahkamah Agung

arbitrase tidak tersedia upaya hukum baik banding maupun peninjauan kembali Dalam hal putusan pengadilan pegeri membatalkan putusan arbitrase, tersedia upaya hukum banding ke Mahkamah Agung, terhadap putusan banding tersebut Mahkamah Agung memutus pertama dan terakhir sehingga tidak ada upaya hukum peninjauan kembali

AKIBAT HUKUM PENOLAKAN PENGAJUAN PENINJAUAN ...

kembali yang pada umumnya tidak dapat diganggu gugat lagi (Soedirjo, 1986: 11) Undang-Undang masih memberi kesempatan untuk mengajukan Peninjauan Kembali dengan segala persyaratan yang ketat, yang menyebabkan Peninjauan Kembali termasuk pada upaya hukum "luar biasa"

KAJIAN TEORITIS TERHADAP KEADAAN BARU (NOVUM) ...

(Novum) sebagai alasan pengajuan peninjauan kembali dalam perkara No45/PK/PidSus/2009 telah sesuai dengan ketentuan Pasal 263 KUHAP dan bagaimana Konstruksi Hukum Hakim Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus permohonan Peninjauan Kembali terpidana mati Hillary K

...

TINJAUAN YURIDIS ATAS PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI ...

pada perkara Peninjauan Kembali tindak pidana narkoba Nomor 39 PK/pidsus/2011 terhadap kesesuaian Pasal 153, serta mengetahui bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 39 PK/pidsus/2011 berkaitan dengan kesaksian saksi yang tidak dihadirkan dalam persidangan